

BAB I

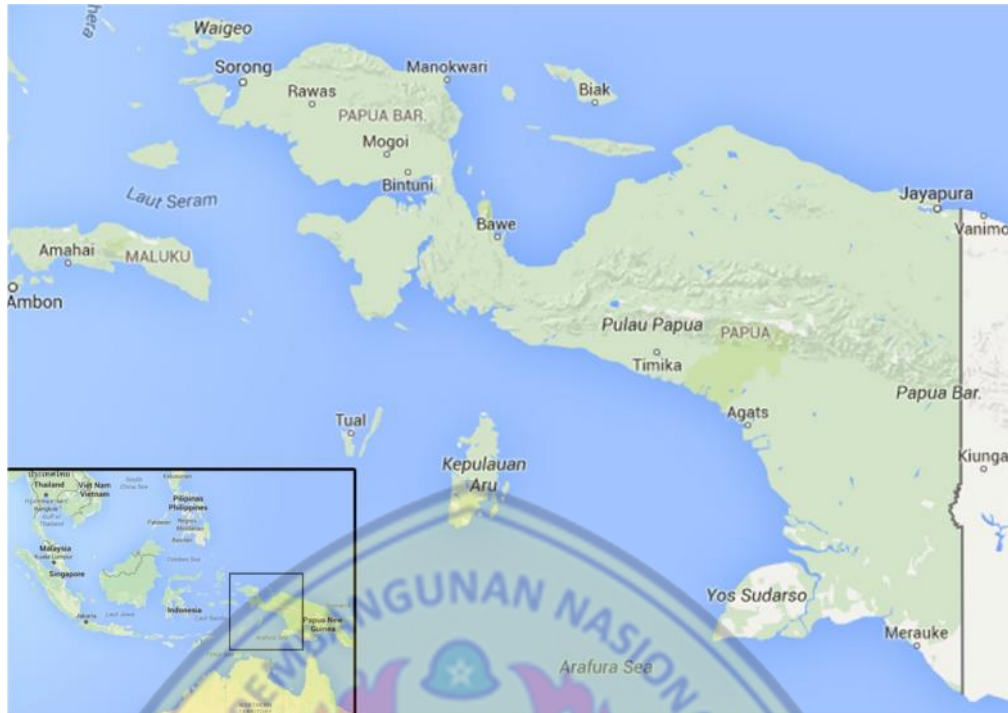
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan dari Hindia Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Keresidenan Irian dikecualikan, tetapi pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan dimana Irian juga diserahkan kepada Indonesia (Nijhoff, 1984, hlm.1). Alasan Belanda untuk mempertahankan Irian pada saat itu beberapa diantara adalah karena faktor kependudukan orang-orang Indo-Eropa yang ingin tetap tinggal di wilayah tropis, indikasi yang menunjukkan bahwa Indonesia akan bergeser ke blok komunis, serta Belanda yang menjanjikan kemerdekaan bagi tanah Papua. Atas alasan tersebutlah Belanda menahan Irian kurang lebih selama 10 tahun.

Indonesia yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta yang berisi : (1) Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial; (2) Kibarkan sang merah putih di Irian Barat; (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Dengan dicetuskannya TRIKORA ini dijadikan sebagai momentum oleh Indonesia untuk membawa masalah ini ke PBB. Usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia melalui jalan damai sudah memungkinkan lagi. TRIKORA telah mempercepat pencapaian Perjanjian New York (*New York Agreements*) antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat atau Nieuw Guinea pada tahun 1962 (Taufik, 2001, hlm.18).

Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa Belanda akan mengalihkan administrasi Irian Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2504 tanggal 19 November 1969 yang menyatakan bahwa Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber : diolah sendiri

Gambar 1 Peta Provinsi Papua

Hasil dari PEPERA yang telah berlangsung dan menyatakan untuk bergabung dengan Indonesia tidak serta merta diterima oleh masyarakat Papua hingga saat ini. Beberapa protes yang dikemukakan oleh masyarakat Papua di antaranya : (1) Pasal XVIII ayat (d) *New York Agreement* yang mengatur tentang penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; (2) Pelaksanaan PEPERA yang menggunakan prinsip perwakilan/utusan berdasarkan musyawarah mufakat; (3) Diserhkannya administrasi pelaksanaan PEPERA kepada pemerintah Indonesia seperti yang diatur dalam *New York Agreements* dianggap sebagai keputusan yang sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran hak-hak politik dan hak asasi manusia bangsa Papua; (4) Keterlibatan pihak militer Indonesia pada pelaksanaan PEPERA tidak saja pada intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer juga terlibat dalam pengaturan pelaksanaan PEPERA (Korwa, 2009, hlm.5).

Melihat tuntutan dan protes yang dikemukakan oleh masyarakat Papua, pemerintah Belanda membentuk sebuah badan/organisasi yang merupakan perwujudan demokrasi di Irian Barat yang diberi nama Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah. Organisasi gerakan ini bersifat ilegal, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua untuk terlepas dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia (Taufik, 2001, hlm.119).

Salah satu gerakan gerakan bawah tanah ini adalah pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (selanjutnya disebut OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korp*) ciptaan Belanda. Pemberontakan OPM yang berawal di Manokwari, kemudian menjalar keseluruh kabupaten di Irian Barat seperti Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen-Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura (Djopari 1993, hlm.1-2).

Seperti yang dilansir di www.komnas-tpnpb.net, OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasai kepada bekas jajahannya yang merdeka, yaitu Indonesia. Pada tahun 1982, organisasi ini membentuk Dewan Revolusioner OPM yang bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua lewat beberapa organisasi internasional seperti PBB, Gerakan Non Blok, ASEAN, dan Forum Pasifik Selatan.

Untuk menindaklanjuti eksistensi OPM di Papua, pemerintah menggelar operasi militer berkesinambungan dari tahun ke tahun untuk menghancurkan OPM. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015, Danu Prionggo, staf Desk Papua Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa soal status Papua pada saat itu belum ada dasar hukum yang mengatakan tentang Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM).

Atas dasar perintah operasi, pada tahun 1961 tentara Indonesia masuk ke Papua dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah

Papua dari Belanda. Beberapa perintah operasi yang pernah dilakukan adalah Operasi Jayawijaya tahun 1961, Operasi Wisnumurti tahun 1963, Operasi Sadar tahun 1965, Operasi Baratayudha tahun 1966-1967, Operasi Pamungkas 1971, Operasi Gagak I tahun 1985-1986, Operasi Gagak II tahun 1986-1987 dan seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yale University, ± 100.000 orang Papua menjadi korban dari operasi-operasi militer yang dilakukan dari tahun 1963 hingga 1978. Banyaknya korban jiwa yang berjatuh membuat pandangan dunia internasional kalau Indonesia melakukan pelanggaran HAM dan membuat masyarakat Papua menjadi ketakutan atas pelanggaran HAM yang telah terjadi selama 20 tahun.

Beberapa protes terkait pelaksanaan PEPERA dan hasil PEPERA berimplikasi pada tuntutan pemisahan diri pada penyelenggaraan Kongres Papua II pada 21 Mei – 4 Juni 2000. Kongres ini adalah puncak dari pertemuan setiap faksi perjuangan kemerdekaan Papua untuk menentukan kelanjutan dari perjuangan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meredam tuntutan pemisahan diri Papua yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Mengimplementasikan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua tidaklah semudah membalik tangan, tentunya memerlukan upaya, waktu, dan komitmen semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Oktober 2015, Kol. Inf. Danu Prionggo, Desk Papua Kemenko Polhukam mengatakan bahwa otsus adalah sebuah alternatif secara politik untuk meredam keinginan merdeka dari kelompok Papua, walaupun hanya diwakilkan oleh beberapa tokoh, tidak menjadi representatif dari seluruh masyarakat Papua. Selain itu, otsus juga untuk mempercepat pembangunan. Substansi mendasar adalah mempercepat pembangunan, tidak sekedar untuk memberikan solusi secara politik tapi dari tinjauan kesejahteraan adalah untuk mengejar ketertinggalan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Papua memiliki wilayah yang cukup luas, karakteristik dan alat belakang sejarah tersendiri. Status politik Papua mulai dipermasalahkan, terutama oleh pihak-pihak yang menentang pelaksanaan

PEPERA 1969 yang saat ini tergabung dalam berbagai organisasi seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat) , NRF-PB (Negara Republik Federal Papua Barat), *Free West Papua Campaign* (FWPC), TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka), ONPB (Otorita Nasional Papua Barat), *International Lawyer for West Papua* (ILWP), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Musyawarah Adat (LMA) dan lain-lain (Kemenko Polhukam 2013, hlm.2).

Di bawah pimpinan Goliath Tabuni, OPM berhasil melakukan kampanye dengan menyiarkan rekaman perjuangan OPM dan hasil kerja keras teman-teman pendukung OPM di Kerajaan Inggris. Pada tanggal 13 Maret 2009, mulai disiarkan oleh salah satu media elektronik yaitu BBC London secara internasional dengan judul *BBCNewsnight : Papuan's Independence Struggle* dan *OPM resistance in West Papua highlands*. Tidak hanya di Inggris saja, OPM juga berhasil menggalang suara di Belanda sehingga pada tahun 2009 terjadi demonstrasi di Den Haag yang menuntut kemerdekaan Papua. Pada tahun 2010, Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney melakukan kampanye yang mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk karena insiden penembakan di tambang emas Freeport dan mendukung kemerdekaan Papua. Selama tahun 2011 dan 2012, OPM berhasil mendapat dukungan secara terus menerus dari beberapa negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Guyana, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru. Secara signifikan, pada awal tahun 2013, di Australia OPM berhasil menyiarkan berita tentang perjuangan OPM dalam negeri Papua Barat. Pada tahun yang sama juga OPM berhasil membuka kantor perwakilannya di Inggris pada tanggal 28 April 2013 dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 2013 dan dihadiri oleh walikota dan parlemen setempat.

OPM melakukan kampanye-kampanye negatif menuntut kemerdekaan dari Indonesia lewat kegiatan demonstrasi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Eropa. Upaya OPM yang sangat signifikan adalah mendirikan kantor perwakilannya di Inggris dan Belanda serta keikutsertaan OPM dalam forum-forum internasional seperti MSG. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenko Polhukam, OPM mengumpulkan sumbangan sukarela dari anggota dan simpatisannya untuk mendukung kegiatannya baik

didalam ataupun luar negeri. Pemasukan juga datang dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah basis kelompok separatis. Sedangkan persenjataan yang mereka gunakan adalah rampasan dari TNI/Polri dan hasil penyelundupan senjata dari luar daerah.



Gambar 2 Poster Kampanye OPM di Inggris tahun 2013

Tidak hanya aksi internasional saja yang OPM lakukan. Di dalam negeri, upaya OPM untuk memerdekakan diri ditunjukkan dengan mengganggu stabilitas keamanan Indonesia, khususnya di Papua seperti dengan menyerang beberapa markas TNI/Polri, pembakaran, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas lainnya. Tak jarang OPM berhadapan langsung dengan TNI dan menimbulkan beberapa korban jiwa. Sebagian besar upaya yang dilakukan OPM adalah kampanye dengan menggunakan media massa dan menjalin hubungan yang baik dengan negara mitranya untuk mempermudah mereka mendapat pengakuan internasional.

Bukti-bukti mengenai pergolakan OPM, adalah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan berupa perusakan lapangan terbang, mengintimidasi penduduk, menculik dan merencanakan untuk merusak alat-alat komunikasi. Kegiatan yang dilakukan oleh OPM selama tahun 2012 s/d 2013 melakukan penembakan sebanyak 49 kali, pembakaran 4 kali, perampasan senjata api sebanyak 4 kali, penganiayaan sebanyak 2 kali, dan penyanderaan sebanyak 1 kali. Selain itu, OPM juga melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora sebanyak 14 kali, unjuk rasa 57 kali, jumpa pers 103 kali, serta ibadah, rapat, pertemuan, deklarasi, sosialisasi, hingga peluncuran buku dan penyebaran selebaran. Beberapa kegiatan tersebut membuat jatuhnya korban jiwa yaitu 10 orang dari TNI, 7 orang dari Polri, dan 20 orang dari masyarakat sipil (Kemenko Polhukam, 2013).

Aktivitas OPM ini tentu mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sebab kelompok separatis ini berhasil menarik perhatian dunia internasional dengan melalui lobby di forum internasional seperti *Melanesia Spearhead Group* (MSG), melakukan kampanye negatif dengan mengangkat hak penentuan nasib sendiri (*Self-Determination*), isu kekerasan dan pelanggaran HAM serta mengembangkan eksistensi organisasi. Selain itu, masuknya organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty Internasional, Human Rights Watch dan media internasional seperti BBC (Inggris), ABC (Australia) adalah sebuah ancaman bagi Indonesia kedepannya.

Pelanggaran HAM di Papua pernah terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto. Dengan penggunaan militer, masyarakat yang dianggap sebagai pemberontak/separatis ditumpas habis. Namun saat ini sudah tidak ada lagi perilaku seperti itu. Kondisi Papua saat ini sudah cukup kondusif, walaupun konflik antar suku dan tingkat kriminalitas masih cukup tinggi. Atas dasar pelanggaran HAM, beberapa kelompok tertentu mengangkat itu tersebut ke ranah internasional.

Untuk menanggapi aktivitas OPM yang dilakukan baik secara internasional ataupun secara nasional tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), yang pelaksanaannya adalah UP4B sesuai Perpres No. 66 Tahun 2011 (Kemenko Polhukam 2013, hlm.2). Perpres ini

dikeluarkan sebagai salah satu bentuk upaya Indonesia dalam mengatasi aktifitas kelompok bersenjata (OPM) yang kerap kali menyerang TNI/Polri dan masyarakat sipil di daerah pedalaman yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Perpres ini juga dijadikan sebagai salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua.

Tabel 1 Presentase Penduduk Miskin di Prov. Papua 2010 – 2013

Kode	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2010	2011	2012	2013 (Sept)
9401	Merauke	14.54	13.22	12.95	12.33
9402	Jayawijaya	41.84	39.03	39.05	41.81
9403	Jayapura	18.64	17.30	17.08	17.58
9404	Nabire	33.68	30.86	30.65	27.69
9408	Yapen Waropen	33.54	30.76	30.35	29.32
9409	Biak Namfor	33.61	30.31	29.84	30.28
9410	Paniai	43.47	37.18	38.69	40.15
9411	Puncak Jaya	43.80	40.25	38.21	39.92
9412	Mimika	22.57	20.78	20.09	20.37
9413	Boven Digoel	25.79	23.52	22.79	23.70
9414	Mappi	33.11	30.14	29.30	30.35
9415	Asmat	35.40	32.38	30.56	33.84
9416	Yahukimo	46.21	42.49	41.98	43.27
9417	Pegunungan Bintang	40.08	36.23	35.63	37.23
9418	Tolikara	41.17	37.81	36.30	38.00
9419	Sarmi	21.09	19.42	18.82	17.72
9420	Keerom	24.12	21.98	21.65	23.23
9426	Waropen	39.88	36.23	36.63	37.27
9427	Supiori	45.75	42.73	41.57	41.50
9428	Membramo Raya	39.98	36.38	35.20	34.25
9429	Nduga	42.53	39.49	38.13	39.69
9430	Lanny Jaya	46.55	43.68	42.43	43.79
9431	Mamberamo Tengah	43.15	43.69	42.83	39.59
9432	Yalimo	44.13	40.65	39.49	40.33
9433	Puncak	44.65	40.77	39.38	41.96
9434	Dogiyai	33.96	30.40	30.08	32.25
9435	Intan Jaya	47.82	41.53	40.64	42.03
9436	Delyai	49.58	46.76	45.92	47.52
9471	Kota Jayapura	17.31	16.03	15.77	16.19
9400	Papua	34.10	31.25	30.66	31.52

Sumber : BPS Papua

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hingga 3% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Papua memiliki keterbelakangan ekonomi sehingga sangat mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya OPM. Kemiskinan yang terjadi di Papua tidak menutup kemungkinan kalau OPM mudah merekrut anggota baru dan menambah massa mereka untuk menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Permasalahan yang terjadi di Papua akan sulit untuk diputus dan menjadi penyebab atau kendala utama dalam rangka membangun atau mengembalikan rasa saling percaya di antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua (Elisabeth dkk 2006, hlm.9). Selain itu, banyaknya isu pelanggaran HAM di Papua yang belum diproses secara hukum menjadi sorotan pihak internasional lewat organisasi-organisasi berbasis HAM yang turut menentang pengintegrasian Papua ke Indonesia. Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi di Papua, yang ditinjau dari aspek separatisme, pelanggaran HAM, hingga intervensi asing, Indonesia seharusnya mampu secara tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua.

OPM masih terus mencari suaka politik untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, serta tetap memperjuangkan kepentingan mereka di Inggris, Belanda, dan Australia serta di forum-forum regional dan internasional seperti MSG, *Pacific Island Forum* (PIF) dan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dalam menyikapi upaya OPM tersebut adalah dengan terus melakukan lobby dan negosiasi dengan negara-negara terkait untuk tidak memberi kesempatan dan peluang kepada OPM untuk mendirikan negara sendiri.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ketidakpuasan masyarakat Irian Jaya (kini bernama Papua dan Papua Barat) atas hasil PEPERA 1969 membuat mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan membentuk TPN/OPM. Kemudian organisasi separatisme ini menggunakan jalur-jalur internasional untuk mencari suaka politik dan mendapatkan pengakuan dari negara lain seperti Inggris, Australia, Belanda, Amerika Serikat dan negara-negara yang berada di Pasifik

Selatan. Pasca berdirinya kantor perwakilan OPM di Inggris tahun 2013, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) memperoleh pengakuan dunia internasional periode tahun 2013 – 2014 ?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan upaya-upaya Organisasi Papua Merdeka dalam mendapatkan pengakuan dunia internasional periode tahun 2013 – 2014.
2. Menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk mendapatkan pengakuan internasional periode tahun 2013 – 2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini masuk ke dalam ranah Pengkajian Strategi serta memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional, untuk memperkaya wawasan mengenai kebijakan luar negeri, diplomasi, dan hukum internasional terutama dalam hal diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional pasca dibukanya kantor perwakilan OPM di Inggris dan Belanda.

I.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini melakukan tinjauan terhadap karya-karya akademis dan non akademis yang memiliki kemiripan dan berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan laporan dari Amnesty Internasional dan Franciscans Internasional, serta jurnal karya Adrianna

Elisabeth dan Yulia Sugandi. Permasalahan yang terjadi di Papua dapat ditinjau dari sisi pelanggaran HAM, kemiskinan, dan aktor yang terlibat.

Dilihat dari sisi pelanggaran HAM, OPM membawa isu pelanggaran HAM ke dunia internasional lewat berbagai INGOs (International Non Governmental Organizations) seperti Amnesty Internasional dan Franciscans International yang secara periodik mengeluarkan laporan-laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Sebagian besar INGOs tersebut mendukung gerakan OPM untuk merdeka dari Indonesia. Berdasarkan laporan Franciscans tahun 2010/2011, tahun 2010 menjadi tahun di mana laporan tentang aksi penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua telah dipublikasikan ke dunia luas. Melalui tayangan video yang mengejutkan dan mengerikan, dunia luas akhirnya mengetahui bagaimana TNI secara sengaja melakukan penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengisolasi Papua dari dunia luar, dengan tidak memberikan akses kepada jurnalis asing, pekerja HAM internasional, peneliti dan diplomat, akhirnya tidak mampu untuk menutupi kebrutalan yang dilakukan oleh anggota tentara terhadap masyarakat Papua. Penyiksaan yang terjadi pada tahun 2010 bukanlah kasus penyiksaan pertama yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, dan tampaknya juga bukanlah yang terakhir. Pada kenyataannya, masyarakat Papua telah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak Indonesia mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963, tentara Indonesia telah melakukan setidaknya sepuluh operasi militer besar terhadap orang asli Papua. Masyarakat Papua yang tinggal di tempat-tempat dimana operasi militer dilaksanakan memiliki cerita mengerikan tentang pelanggaran yang mereka derita. Mereka menceritakan, misalnya, bagaimana mereka menyaksikan rumah mereka dibakar, juga kebun dan sumber mata pencaharian mereka yang dihancurkan. Mereka menggambarkan bagaimana mereka melihat teman-teman, kenalan dan anggota keluarga mereka di intimidasi, di siksa dan di bunuh selama operasi militer. Selain itu, Amnesty Internasional sebagai salah INGOs yang menjunjung tinggi nilai HAM, mendukung kemerdekaan Papua atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan terkait. Organisasi ini juga mengeluarkan laporan secara periodik seperti pelanggaran HAM yang terjadi di Nabire tahun 2009 dan Pulau

Yapen pada tahun 2010 serta kekerasan yang dialami oleh para pelaku demonstrasi diakhir tahun 2008. Amnesty Internasional juga mendesak pemerintah Indonesia yang salah satunya yaitu membebaskan individu-individu atau tawanan smata-mata untuk perdamaian untuk melatih pemahaman mereka tentang kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berasosiasi.

Dilihat dari sisi kemiskinan, Franciscans International mengeluarkan *West Papua Factsheet*. Papua sangat terkenal sangat kaya dengan sumber daya alamnya tapi berbanding terbalik dengan 80% orang Papua yang hidup dalam kemiskinan. Karena itu sangatlah jelas bahwa pendapatan dari Papua yang didapat dari sumber daya alamnya belum diserap secara merata melalui pelayanan-pelayanan yang menguntungkan bagi penduduk asli Papua. selain itu, minimnya sarana kesehatan dan pendidikan serta pengeksploitasian sumber daya alam adalah faktor-faktor yang mendorong tingginya tingkat kemiskinan di Papua. Perluasan pertambangan Freeport di Timika, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk sungai-sungai yang tercemar dan penebangan kayu secara besar-besaran. Berbagai rencana perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman bagi penduduk asli akan terjadinya pengungsian dan pemiskinan yang bakal menimpa mereka. Kesehatan dari penduduk asli Papua semakin bertambah buruk karena kurangnya fasilitas kesehatan, obat-obatan dan dokter. Mayoritas penduduk asli Papua kekurangan akses terhadap pendidikan. Semua faktor-faktor negatif tersebut sangat berperan dalam timbulnya kemiskinan yang sangat ekstrim yang dialami oleh penduduk asli Papua.

Selain itu di lihat dari sisi aktor yang terlibat, artikel dalam jurnal karya Adrianna Elisabeth yang berjudul “Dimensi Internasional Kasus Papua” menjelaskan bahwa karakteristik atau dimensi internasional kasus Papua di tentukan oleh peran aktor negara dan aktor non negara yang secara konsisten dan terus-menerus telah “menginternasionalisasi” isu Papua, misalnya melalui lobi dan diplomasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia, antara lain OPM dan beberapa anggota Presidium Dewan Papua (PDP). Gagasan untuk menginternasionalisasi Papua adalah salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres Rakyat Papua II, yakni pembentukan sebuah tim untuk melobi

masyarakat Internasional, termasuk meminta bantuan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini DK PBB sebagai penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk untuk menjaga/memelihara keamanan di Papua sampai terbentuk pemerintahan yang tetap. Selain itu kongres juga meminta PDP melakukan dialog dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB. Kemampuan diplomasi Indonesia sangat menentukan tingkat keberhasilan penyelesaian masalah internal, terutama dengan menjelaskan persoalan sesungguhnya, termasuk persoalan ekonomi dan politik di Papua. Selanjutnya pemerintah mengajak pihak internasional dalam menciptakan *peace and order* di daerah-daerah konflik di Indonesia. Dimana keamanan dan stabilitas domestik Indonesia akan berpengaruh pada keamanan dan stabilitas regional dan internasional, termasuk bagi kepentingan ekonomi Australia. Selain itu jurnal karya Yulia Sugandi yang berjudul “Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua”. Makalah ini menunjukkan peran dari setiap para pelaku perubahan sosial di Papua termasuk di antaranya masyarakat akar rumput, organisasi masyarakat madani, pemerintah lokal, perempuan, militer dan pemerintah pusat, berikut keterlibatan organisasi-organisasi internasional dengan strategi-strategi intervensi mereka. Sekarang ini ada banyak badan internasional yang bekerja di Papua, mulai dari badan-badan PBB, kedutaan-kedutaan besar, organisasi-organisasi donor, misionaris dan LSM internasional dengan program yang luas meliputi pengenalan gender, pengelolaan SDA, pendidikan, peningkatan kapasitas, pengelolaan bencana alam, ekonomi lokal dll. Jurnal ini merekomendasinya bagi badan internasional untuk mengelola kesenjangan antar kelompok masyarakat, memberantas perasaan rendah diri, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta meluruskan penyimpangan.

I.6 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjelaskan, mengkaji dan mengetahui diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dibutuhkan beberapa konsep yang relevan digunakan agar dapat menganalisis permasalahan tersebut.

I.6.1 Kebijakan Luar Negeri

Menurut Chris Brown (2005, hlm.63), kebijakan luar negeri adalah sebuah cara untuk mengartikulasi dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Selain itu, menurut K.J. Holsti (1995, hlm.83) kebijakan luar negeri adalah ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan pada kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara atau negara-negara lain, pada aktor-aktor non negara, pada ekonomi internasional, atau pada lingkungan fisik dunia. Sedangkan kebijakan luar negeri menurut Daniel Papp (1997, hlm.134) adalah tindakan terarah yang dilakukan negara demi mencapai tujuan yang menjadi kepentingannya.

Dari beberapa definisi di atas, kebijakan luar negeri suatu negara harus berdasarkan dengan kepentingan nasional dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional. Dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri harus diarahkan untuk mencapai serta melindungi kepentingan nasional negaranya. Kebijakan luar negeri akan menentukan arah diplomasi yang akan digunakan.

Kebijakan luar negeri yang dianut oleh Indonesia yaitu politik luar negeri bebas dan aktif yang mulai di jalankan dari tahun 1945 hingga saat ini. Sesuai dengan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “...melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia berdasarkan pada konstitusi yang berlaku. Setelah beberapa kali pergantian presiden Indonesia, politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif. Artinya adalah bahwa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok dan tetap aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia adalah mengatakan kepada dunia dan komunitas internasional bahwa Papua dalam keadaan aman dan baik-baik saja.

I.6.2 Diplomasi

Sir Ernest Satow dalam bukunya *A Guide to Diplomatic Practice* mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antar pemerintah yang berdaulat, yang kadang kala diperluas hubungan dengan negara-negara jajahannya. Negara melalui kedutaan, perwakilan di badan-badan internasional, diplomat atau utusan, wakilnya berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondensi (nota diplomatik), pembicaraan resmi dan informal, menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. (Sukawarsini Djelantik 2008, hlm.4-5). Menurut Sumaryo(1995, hlm.1-2), diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya. Sedangkan menurut Sir Harold Nicolson, diplomasi berkaitan dengan masalah-masalah luar negeri dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat lima hal dalam diplomasi yaitu politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, suatu cabang dinas luar negeri, serta mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional (Nicolson 1988, hlm. 98-111).

Diplomasi sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam menjalankan praktik diplomasi harus ditinjau dari hubungan antar negara dan kebijakan luar negeri yang dianut. Diplomasi juga sebagai salah satu cara untuk mengamankan kepentingan nasional negara, baik dalam menjaga keamanan dalam negeri ataupun luar negeri. Bentuk diplomasi yang dilakukan adalah diawali dengan lobby dan kemudian bernegosiasi.

Semakin berkembangnya kegiatan diplomasi, terdapat beberapa jalur yang digunakan dalam upaya diplomasi yang dilakukan,yaitu (Dhajuno 2015, hlm.15-16) :

a. *First track diplomacy*

Aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi ini yaitu aktor negara seperti antar pemerintah suatu negara. Dalam diplomasi ini, para aktor diplomasi pertama, melakukan kegiatan berdasarkan pada kekuasaan dan sifat kaku dalam menjalankan interaksi resmi antara wakil-wakil yang telah diberi intruksi oleh

negara yang berdaulat, telah dipengaruhi secara luar biasa oleh aktor-aktor dalam diplomasi jalur kedua. Upaya-upaya diplomasi melalui jalur pertama (pemerintah kepada pemerintah) biasanya gagal dalam menyelesaikan akar permasalahan dari sebuah konflik. Karena kegagalan tersebut, jalur kedua (diplomasi antar warga negara) harus dikembangkan sebagai salah satu cara alternatif untuk menangani akar permasalahan dari konflik-konflik antar negara.

b. *Second track diplomacy*

Terdiri atas kelompok-kelompok kepentingan ekonomi melalui sumber daya, lingkungan, kemanusiaan, kriminal dan kepentingan pemerintahan global. Aktor non negara ini saling berinteraksi dengan rekan-rekannya di negara lain sehingga mampu mempengaruhi, memberi masukan, membentuk dan mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri. Menurut Mc. Donald, upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur kedua ini jangan dianggap sebagai pengganti upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur pertama, tetapi harus dipandang sebagai pendukung yang dapat melengkapi kegiatan mereka. Secara ideal, upaya-upaya pada diplomasi jalur ini harus membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi pemerintah untuk mengakui dan mempergunakan informasi-informasi penting dan cara pandang yang dimiliki oleh diplomat-diplomat jalur kedua.

c. *Multi track diplomacy*

Diplomasi ini sebagai kelanjutan dari diplomasi jalur kedua karena adanya perbedaan upaya-upaya diplomasi. Idealnya, setiap diplomasi harus saling mendukung dari segi keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. Sehingga kelima jalur dapat bekerjasama untuk tujuan membangun fondasi kekuatan yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi upaya-upaya *first track diplomacy* (Sukawarsini Djelantik, hlm.19-21). Aktor dalam diplomasi jenis ini adalah gabungan dari aktor-aktor diplomasi jalur pertama dan diplomasi jalur kedua seperti pemerintah (negara); non pemerintah/professional (non negara); bisnis; masyarakat sipil; penelitian, pelatihan, dan pendidikan; aktivis; agama; pendanaan; dan media massa.

Diplomasi yang Indonesia gunakan adalah diplomasi yang aktif, kreatif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan rekatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta

rasional dan luwes dalam pendekatan berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional melalui penciptakan dan pengembangan kemitraan yang komprehensif dan strategis untuk menciptakan peluang dan mengambil manfaat dan keuntungan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam penelitian ini, diplomasi Indonesia membawa orang-orang intelektual dari Papua ke negara-negara pendukung OPM.

I.6.3 Separatisme

Separatisme merupakan salah satu tindakan menentang keutuhan wilayah atau kemerdekaan satu negara dan karena itu menentang juga Piagam PBB. Selain itu, separatisme juga merupakan upaya membongkar upaya kepastian hukum mengenai wilayah atau batas-batas wilayah maupun kedaulatan negara, dan tidak adanya kepastian hukum pasti bermuara pada konflik atau sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Sihombing 2005, hlm.49).

Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius.

Menurut Dewi Fortuna Anwar, bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Dalam bentuk federasi atau serikat yang longgar, negara bagian bergaris etnis yang didukung oleh Belanda cenderung menimbulkan kecurigaan pemerintah Indonesia. Ada kecenderungan dari beberapa negara bagian dalam memperoleh kemerdekaannya.

Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang atas rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan. Separatisme juga bisa diartikan suatu kelompok nasionalis yang mencoba untuk melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Kebanggaan kelompok separatisme adalah etnis, dan bisa juga perang saudara. Separatisme berhubungan dengan konsep nasionalisme, dimana bangsa menjadi rujukannya (Hartati 2010, hlm 2-3).

Adapun faktor penyebab separatisme adalah sebagai berikut:

1. Faktor ideologis

Muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif.

2. Faktor kezaliman politik

Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan kepentingan politiknya. Kalaupun ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu, pada tingkatan tertentu, akan memicu lahirnya gerakan-gerakan separatisme.

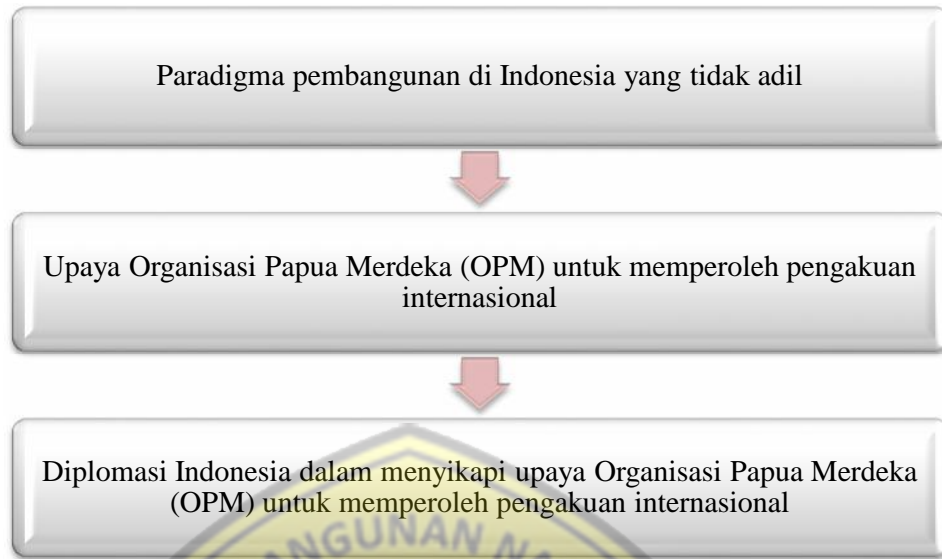
3. Faktor ekonomi.

Pada awal masa reformasi, beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menuntut sikap adil pemerintah. Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan satu-satunya motif yang bisa mendorong separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memainkan peranan penting dalam gerakan separatisme di banyak negara. Dari sejarah perpolitikan dunia, kita mengetahui di mana ada peran Amerika Serikat dan Eropa (terutama Inggris dan Prancis), kepentingan ekonomi selalu mengemuka. Kepentingan ekonomi ini juga menjadi faktor penting masuknya intervensi atau peran asing.

4. Intervensi asing

Mantan direktur intelejen BAKIN, Dr. AC Manullang, dalam wawancara dengan Koran Tempo, mengatakan bahwa ada keterlibatan dinas intelejen Amerika Serikat, CIA, dalam berbagai kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia chaos.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa asumsi diantaranya :

1. Permasalahan yang terjadi di Papua merupakan permasalahan domestik yang di internasionalisasi oleh pihak-pihak yang mendukung gerakan separatisme OPM.
2. Diplomasi Indonesia cenderung defensif dalam menyikapi upaya yang dilakukan oleh OPM dalam mendapatkan pengakuan dunia internasional.
3. Strategi diplomasi Indonesia sejauh ini masih relevan yaitu dengan membawa orang-orang intelektual dari Papua ke negara-negara pendukung OPM.

I.9 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini melihat bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk memperoleh pengakuan Internasional. Periode penelitian ini dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2014. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan dalam melakukan studi penelitian. Hal tersebut diperlukan guna menjawab permasalahan yang terjadi.

I.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Data Primer : menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah. Selain itu, melakukan wawancara dengan Desk Papua Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri; Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri dan Tim Damai Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Data Sekunder : melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut tentang OPM dan diplomasi Indonesia serta surat kabar dan artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Teknis analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

Data wawancara yang diperoleh dari Desk Papua Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri; Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri dan Tim Damai Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia akan digunakan sebagai data dalam penulisan BAB II, BAB III dan BAB IV, mengenai OPM dan diplomasi Indonesia.

Secara keseluruhan data primer berupa wawancara dengan Desk Papua Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri; dan Tim Damai Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia beserta dokumen resmi yang didapatkan, serta data sekunder berupa bahan-bahan tertulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, akan digunakan untuk membedah isu dalam penulisan. Data-data tersebut juga akan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan di dalam penelitian.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan sub-bab latar belakang terjadinya mengapa Indonesia menyikapi upaya-upaya yang dilakukan oleh OPM dalam mendapatkan pengakuan internasional. Selain itu bab ini juga berisikan permasalahan pokok, tujuan serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran yang berisikan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah alur pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Paradigma Pembangunan Indonesia dan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, bab ini berisikan paradigma pembangunan Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku, kondisi umum Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pelaksanaan dari otonomi khusus yang diberikan tahun 2001 hingga sekarang

BAB III Upaya OPM dalam Memperoleh Pengakuan Internasional Periode 2013 – 2014, bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya OPM dan kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan OPM serta upaya-upaya OPM dari tahun 2013 hingga 2014, baik secara domestik ataupun internasional dalam mendapatkan pengakuan dunia internasional.

BAB IV Analisis Diplomasi Indonesia dalam Menyikapi Upaya OPM dalam Memperoleh Pengakuan Dunia Internasional Periode 2013 – 2014, bab ini berisikan bagaimana analisa *multitrack* diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk memperoleh pengakuan dunia internasional pada periode 2013 – 2014 selain itu di bab ini juga membahas hambatan apa saja yang dihadapi oleh Indonesia.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan mengenai diplomasi Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk memperoleh pengakuan dunia internasional.

